Tajuk

Umat Islam Diminta Tidak Terprovokasi

PELAKU pembakaran bendera bertuliskan kalimat Tauhid yang terjadi di Limbangan, Garut, Jawa Barat pada Senin (22/10), dikabarkan sudah meminta maaf kepada seluruh umat Islam.

Disisi lain, kasus pembakaran bendera pada peringatan Hari Santri Nasional itu sudah ditangani cepat oleh jajaran Kepolisian Resor Garut, berikut mengamankan terduga yang membakar bendera tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengimbau seluruh elemen umat Islam untuk memaafkan orang yang melakukan aksi pembakaran bendera tersebut. Ketua MUI Kabupaten Garut KH Sirojul Munir kepada wartawan di Garut, Rabu menyatakan, permohonan maaf itu seyogyanya diterima dan dimaafkan, dan itu sudah merupakan ajaran dalam Islam.

Permintaan maaf itu tentu harus kita sambut baik oleh seluruh masyarakat Muslim, para tokoh-tokoh dan para ulama di berbagai daerah. Bukankah saling memaafkan antarmuslim merupakan ajaran dalam Islam sehingga harus dilaksanakan untuk kebaikan bersama.

Selain itu demi keutuhan bangsa dan menghindari terjadinya gesekan antarumat muslim, selayaknya kita tidak memperbesar masalah ini. Kita serahkan penyelesaiannya secara hokum oleh aparat kepolisian. Jadi, tidak perlu dibesar-besarkan dan dijadikan polemik karena hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memicu gesekan, yang dapat memicu konflik internal umat beragama.

Kita sangat mengutuk tindakan pembakaran tersebut, karena telah menimbulkan kegaduhan di kalangan umat Islam. Kalimat tauhid merupakan esensi paling pokok dari ajaran Islam sehingga pembakaran tersebut melukai hati umat Islam.

Meski demikian, peristiwa itu harus kita sikapi dengan bijak, tidak emosional dengan menggunakan kata-kata kasar seperti melaknat, dan mengatakan biadab. Sesama umat muslim mari kita mendoakan agar para pelaku segera bertaubat sehingga tidak mengulang kembali perbuatannya dikemudian hari.

Sebelumnya beredar video berdurasi 02.05 menit di media sosial, terlihat ada seorang berbaju Banser yang membawa bendera berwarna hitam bertuliskan kalimat Tauhid.

Belasan orang diduga anggota Banser lainnya kemudian berkumpul untuk bersama-sama menyulut bendera tersebut dengan api. Sebagian dari mereka mengenakan pakaian loreng khas Banser lengkap dengan baret hitam. Insiden Pembakaran Bendera Bertuliskan Kalimat Tauhid Oleh Banser NU Dikecam Berbagai Pihak

Kita mengingatkan, siapapun tidak boleh melecehkan agama orang lain, kitab suci agama lain, kalimat-kalimat tauhid agama lain. Negeri ini berdiri tegak karena saling menghormati, kebhinnekaan. Selama 73 tahun negeri ini merdeka tetap kokoh, tak lain karena saling menghormati satu dengan yang lainnya.

Itulah sebabnya, siapapun dia, mau NU, Muhammadiyah, atau kelompok-kelompok lainnya, ormas, tentu harus bisa menjaga keutuhan dan mencegah gesekan atau kegaduhan di negeri ini. Berbuatlah secara arif dan bijaksana agar tidak menyinggung dan menghina orang lain maupun kepercayaan orang lain.

Khusus kepada Banser harapan kita untuk menertibkan anggotanya agar dikemudian hari tidak gegabah dan berlebihan dalam melakukan tindakan yang dapat memancing emosi umat Islam maupun kelompok tertentu. Selesaikan semua masalah dengan kepala dingin, tidak perlu melakukan aksi-aksi jalanan atau melakukan sweeping, karena hal itu hanya bisa dilakukan aparat keamanan.

Jika hal ini dilakukan tentu akan membuat ketersinggungan kelompok lain, dan pada akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan sehingga dapat memicu konflik internal umat beragama.

Sekali lagi kita meminta semua pihak untuk dapat menahan diri, tidak terpancing dan terprovokasi pihak-pihak yang ingin mengadu domba dan memecah-belah bangsa Indonesia.

Kita imbau agar semua pihak untuk menyerahkan ini ke proses hukum. Polisi juga diminta untuk bertindak cepat, adil dan professional. Jangan sampai umat islam bergerak mengadili sendiri penghina agama tersebut karena perbuatan tersebut telah sangat memprovokasi umat Islam dimanapun dan sangat mengadu domba anak bangsa.

Kepada pimpinan ormas Islam, para kiai, ulama dan ustad agar ikut membantu mendinginkan suasana di kalangan umat Islam. (***)

HARIAN TERBIT

Sejak 19 Juli 1972 di Jakarta
Diterbitkan oleh
PT. Astri Cahaya Gemilang

Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab:
H. Ali Akbar Soleman

Redaktur Cetak dan Online: Anugrah Tri Hapsoro Aji, Arbi Krishadiyanto, Hermansyah, M. Bachu, M. Zahroni, Romi Syahril, Zamzam Siregar | **Staf Redaksi:** Eka Putra FN, M. Danial Bangu, Safari Sidakaton, Sammy Edward W | **Layout:** Sadeli, Sony, Saefudin | **Sekred:** Titie Budhi Waty | **Pracetak:** Yono | **Iklan:** Sri Endah | **Alamat Redaksi/Tata Usaha:** Jl. Duri Raya, No.64, RT.006/RW.01, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11510 Telepon (021) 5683948, Fax: (021) 29336195 **Tarif Iklan:** Display Berwarna Rp 45.000/mmk, Hitam Putih Rp 35.000,-/mmk. | **E-mail:** hanter.online@gmail.com | **Website:** harianterbit.com | Terbit enam kali seminggu | **SIUPP:** No.093/SK/MENPENSIUPP/A.7/1986, tanggal 15 Maret 1986. ISSN. 0215-2975, | **Percetakan:** PT Aliansi Temprina | **Alamat:** Jalan Raya Benda 26C, Tangerang (isi di luar tanggung jawab percetakan).

CITIZEN JOURNALISM

KECANDUAN IMPOR PANGAN YANG MEMATIKAN

Oleh **Edy Mulyadi**

"**BAYANGKAN**, kalau uang impor produk pangan yang Rp24 triliun dipompakan ke dalam negeri. Pasti petani dan petambak garam kita akan sejahtera. Sayangnya, uang itu justru mengalir ke petani negara lain karena impor yang ugal-ugalan," kata ekonom senior Rizal Ramli, kepada wartawan di KPK, Selasa pagi (23 Oktober).

Mantan Menko Ekuin dan Menkeu era Presiden Gus Dur ini datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan tindak korupsi pada kebijakan impor pangan. Ditemani sejumlah pengacara, dia membawa hasil laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejumlah materi lainnya. Di KPK Rizal Ramli diterima Komisioner KPK Basaria Panjaitan, Direktur Litbang KPK, Direktur Penindakan KPK dan sejumlah staf lain.

Angka Rp24 triliun yang dimaksudkan Rizal Ramli itu adalah devisa yang mengalir ke luar negeri karena impor beras, gula, dan garam. Jumlah itu belum termasuk nilai impor daging sapi dan bawang putih. Sejatinya, angka yang disebut lelaki yang sejak mahasiswa dikenal gigih menyuarakan ekonomi kerakyatan itu sangat konservatif. Jika dihitung ulang, jumlahnya bisa dua kali kali lipat lebih besar.

Contohnya, impor bawang putih dari Cina yang 556.000 ton pada harga Rp4.500/kg plus ongkos kirim Rp3.000/kg, maka angkanya mencapai Rp4,17 triliun. Sedangkan devisa yang terpakai untuk impor beras asal Thailand dan Vietnam sebanyak 2 juta ton, mencapai Rp17,88 triliun. Begitu juga dengan impor gula sebanyak 1,1 juta ton membuat devisa yang terbang ke luar negeri sebesar Rp8,66 triliun. Sementara impor daging sapi yang 223.000 ton, nilainya mencapai Rp14,33 triliun. Dengan demkian, total devisa yang terkuras untuk impor empat produk pangan tadi mencapai sekitar Rp45 triliun.

Merugikan Perekonomian Negara

KPK selama ini membidik para koruptor dengan pasal2 ayat (1) UU no. 3/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Ancaman lainnya berupa denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Badan antirasuah itu dan aparat penegak hukum selama ini fokus pada aspek merugikan keuangan negara. Sementara aspek merugikan perekonomian negara relatif belum tersentuh. Padahal dampak yang diakibatkan atas terjadinya tindakan yang merugikan perekonomian negara jauh lebih besar dibandingkan 'sekadar' merugikan keuangan negara.

Dengan meminjam ucapan Rizal Ramli di awal tulisan ini, bahwa kalau uang impor produk pangan yang Rp24 triliun dipompakan ke dalam negeri, tentu perekonomian nasional jadi menggeliat. Petani dan petambak garam bisa menikmati hasil panennya dengan harga yang bagus. Ini tentu akan berdampak pada meningkatnya daya beli. Jangan lupa, konsumsi masyarakat menyumbang sekitar 63% dari total pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan impor ugal-ugalan juga telah menyebabkan rakyat Indonesia membayar produk pangan jauh lebih mahal dibandingkan yang seharusnya. Pasalnya, sistem kuota impor telah melahirkan kartel dan mafia impor pangan. Mereka inilah yang mendikte harga hingga meraup keuntungan jauh di atas batas wajar. Dengan keuntungan yang mencapai ratusan persen itulah, para mafia dan kartel impor pangan menyogok pejabat terkait sehingga bisnisnya bisa terus berlangsung.

Kalau pemerintah menghapus sistem kuota impor dan digantikan dengan sistem tarif, tentu praktik kartel dan mafia impor bisa ditekan sampai tahap minimal. Dengan begitu, petani dan petambak lokal terlindungi dari serbuan produk impor. Ujung-ujungnya harga produk pangan dapat lebih murah. Rakyat pun jadi *happy*.

Kebijakan impor seperti inilah yang diadukan Rizal Ramli dan para pengacaranya ke KPK. Pengaduan itu berbasis hasil laporan audit BPK tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata niaga impor periode 2015 sampai semester pertama 2017. Hasil laporan audit itu menemukan sejumlah fakta hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Kecanduan Impor

BPK menemukan sejumlah pelanggaran hukum oleh pihak-pihak terkait karena pelaksanaan impor tanpa melalui rekomendasi dari pihak terkait. Pelanggaran juga terjadi karena impor tidak sesuai persyaratan, tanpa berdasarkan rapat koordinasi atau tanpa analisis kebutuhan yang diperlukan.

"Kami melihat ada fenomena *import addictive* atau kecanduan impor yang dilakukan sejumlah okrum pejabat terkait. Orang-orang ini doyan impor, karena menguntungkan mereka dan mendapatkan manfaat dari perburuan rente. Modusnya, antara lain dengan menciptakan rekayasa kelangkaan atau *artificial scarcity* sehingga ada alasan untuk melakukan impor," papar Rizal Ramli.

Menjadi petani di negeri ini memang memerlukan daya tahan dan kesabaran ekstra. Petani nyaris tidak mungkin kaya. Pokok pangkalnya, kebijakan produk pangan dari para pengelola negeri cenderung tidak berpihak kepada petani.

Bukan itu saja, para pengemban kebijakan di sektor ini juga terkesan sadis. Betapa tidak, mereka tetap saja ngotot melakukan impor beras, gula, garam, dan bawang justru menjelang dan saat panen raya. Padahal suara petani yang menolak impor itu sangat nyaring. Ditambah dengan sikap serupa dari banyak kepala daerah, teriakan itu sudah sangat gemuruh. Tapi entah bagaimana dan apa sebabnya, Pemerintah bagai buta-tuli. Tetap ngeyel dengan rencana impor beras tadi.

"Beras saya impor. Enggak usah (perdebatkan), karena itu diskresi saya," kata Mendag Enggartiasto Lukito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/1) silam.

Pernyataan Enggar ini jelas menunjukkan sikap degil dan arogan penguasa. Bagaimana mungkin seorang menteri bisa berkata demikian untuk keputusannya yang menyangkut hajat hidup begitu banyak orang? Tidakkah dia menyadari, bahwa kecanduan impor yang dideritanya telah kian memiskinkan petani dan menyusahkan rakyat Indonesia?

Lebih seru lagi, keputusan Mendag yang ngotot impor beras itu ternyata sama sekali tidak didukung data akurat. Pada Raker dengan Komisi VI DPR, Kamis (18.01) pekan silam, dia mengaku belum mengantongi data beras secara lengkap. "Masih banyak gudang yang belum melapor," ujarnya. Sungguh ironi dan tragedi besar. Ngotot mengimpor beras menjelang panen raya ternyata hanya berdasarkan dugaan-dugaan.

Kisruh impor pangan sejatinya bisa diatasi, bahkan dicegah, kalau saja Presiden Jokowi mengambil sikap tegas. Dia harus menentukan di mana posisinya. Bersama rakyat dan petani Indonesia, atau terus menutup mata (dan bermain mesra?) dengan para pejabat dan pengusaha penikmat rente?

■ Penulis adalah Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

MENGGAGAS INDONESIA HEBAT

Oleh **Ujang Komarudin**

TAK MUDAH memang menjadikan Indonesia hebat dan bermartabat. Butuh kemauan seluruh anak bangsa untuk meraihnya. Perlu kerja keras dan ikhlas untuk membangun bangsa besar yang hebat. Hebat atau tidaknya republik ini bergantung pada bagaimana bangsa ini ditata dan dikelola. Bangsa besar dan hebat adalah bangsa yang menghargai kerja keras, kejujuran, kepedulian, kasih sayang, cinta, kekompakan, kebersamaan, persatuan, dan kesatuan.

Bangsa yang tidak punya visi akan musnah. Itulah penggalan pidato pelantikan Franklin D. Roosevelt, 4 Maret 1933. Roosevelt merupakan Presiden Amerika satu-satunya yang terpilih empat kali. Pidato pada pelantikannya tersebut menjadi salah satu pidato yang mengubah wajah dunia. Begitu juga dengan Indonesia, jika tidak memiliki visi, maka akan musnah. Musnah diterjang oleh perubahan jaman yang tak mengenal kasta, suku, ras, budaya, agama, dan negara.

Visi dapat menjadi petunjuk arah bagi kapal Indonesia raya dalam mencapai tujuan. Kompas bagi cita-cita bangsa kedepan. Jalan bagi terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Visi akan mengarahkan bangsa yang kerdil menjadi bangsa yang stabil. Dari bangsa yang lemah menjadi kuat. Dari bangsa yang gelap menjadi terang. Dari bangsa yang hancur menjadi cihuy. Dari bangsa yang gagal menjadi bangsa besar. Visi, ya, kuncinya visi. Tentu visi yang memiliki misi, dan juga dijabarkan dengan program-program pembangunan bangsa yang terukur dan imple-

Untuk menjadi Indonesia hebat tidaklah mudah. Namun tidak juga terlalu sulit. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi kita pasti bisa. "Nothing is impossible in this world", begitulah kalimat bijak yang sering menjadi referensi bagi orang yang selalu optimis. Begitu juga tidak ada yang tidak mungkin, untuk menjadikan Indonesia hebat. Indonesia hebat adalah keniscayaan. Indonesia hebat adalah keinginan, harapan, dan cita-cita. Indonesia hebat adalah masa depan yang penuh keceriaan dan kebahagiaan. Dan Indonesia hebat adalah keyakinan kita bersama.

Dengan jumlah penduduk yang menyentuh 265 juta jiwa, terhampar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga pulau Rote. Memiliki gugusan pulau yang indah hingga 17.000 pulau. Dengan kekayaan ragam bahasa daerah yang berbeda yang mencapai 652 bahasa, dengan jumlah tarian sebanyak 1.592 yang memukau dan berjuta warna. Dengan adat istiadat yang menjunjung luhur nilai-nilai kesopanan dan kesantunan, dengan berbeda-beda keyakinan, ditambah dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, dan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Maka, Indonesia sangat mungkin untuk menjadi negara hebat dan disegani di dunia.

Rindu Indonesia Hebat

Gagasan Indonesia hebat jangan sampai hanya menjadi jargon politik yang tanpa arti dan makna. Jangan hanya menjadi jargon partai politik yang hampa. Jangan juga hanya menjadi retorika sesaat kelompok tertentu. Karena kita semua sedang merindukan dan mendambakan Indonesia hebat. Bukan Indonesia yang pemimpin dan rakyatnya kalah sebelum berperang. Menyerah sebelum bertanding. Terluka sebelum bertempur. Terhuyung sebelum memasang kuda-kuda. Jatuh sebelum mendaki. Benjol sebelum masuk ring tinju. Terpelanting sebelum dibanting. Tertinggal sebelum berlari. Terlena sebelum terlaksana. Dan terbenam sebelum muncul. Indonesia hebat harus terlaksana. Apapun resikonya. Apapun kendalanya. Dan apapun yang terjadi. Kitalah semua penggerak Indonesia hebat itu.

Indonesia hebat adalah kita. Dan kitalah pejuang Indonesia hebat itu. Membangun optimisme dan menghilangkan pesimisme adalah tugas kita semua. Tak mungkin bangsa ini dibangun atas dasar pesimisme dan berjiwa kerdil. Republik ini akan hebat, jika kita bersama-sama meyakini dengan sepenuh jiwa-raga bahwa kita bisa. Ya, kita pasti bisa. Dengan optimisme dan kerja keras tak ada yang tidak bisa kita lakukan. Termasuk untuk menjadikan Indonesia hebat di masa depan.

Tahun politik inilah momentum untuk menjadikan Indonesia hebat. Bahkan harus lebih hebat lagi. Pileg dan Pilpres serentak tahun 2019 sejatinya harus melahirkan dan menghasilkan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, dan partai politik pemenang pemilu yang dapat membawa Indonesia menuju kejayaan dan kehebatan. Sekali lagi kita rindu akan kehebatan itu. Rindu akan kehebatan tumpah darah Indonesia tercinta ini. Pemilu merupakan momentum terbaik untuk menjadikan Indonesia hebat dan bermartabat.

Membangun Indonesia hebat pasti akan melalui proses jatuh bangun. Membutuhkan energi bangsa yang tidak sedikit. Membangun Indonesia yang hebat memerlukan strategi dan kemauan dari seluruh komponen anak bangsa. Tak ada yang hebat jika dilakukan sendirian. Sesuatu yang hebat akan terlihat dan terpatri jika dilakukan secara bersama-sama. Kebersamaan merupakan modal dasar dalam menciptakan Indonesia hebat yang kuat dan berdaulat. Kebersamaan adalah rumus dalam membangun Indonesia hebat yang kita rindukan tersebut.

Partai politik harus menjadi garda terdepan dalam membangun Indonesia hebat. Parpol sebagai wadah pencetak para pemimpin Indonesia masa depan, sejatinya sudah harus berfikir untuk menjadikan Indonesia yang betul-betul hebat. Hebat bukan hanya sebagai semboyan. Bukan hanya jargon. Tetapi hebat yang betul-betul dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hebat bukan hanya dihargai dan dihormati oleh warganya. Tetapi juga hebat di mata dunia. Hebat dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan para politisi, ekonom, pengusaha, aparat TNI-Polri, birokrasi, dosen, guru, pedagang, petani, buruh, dan nelayan yang hebat untuk menjadikan Indonesia hebat.

Partai-partai politik jangan hanya memikirkan kekuasaan dan jabatan semata. Namun melupakan cita-cita untuk membangun bangsa. Abai dalam menjadikan Indonesia hebat. Tak peduli atas nasib bangsa. Tersesat dalam pragmatisme politik. Melanggengkan kemunafikan. Mentorerir Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Memperalat rakyat. Melambaikan dan menumbuhkan nyinyiran. Menambah subur pertentangan. Dan menciptakan perdebatan dan perseteruan yang tidak substantif. Namun partai politik harus yang terdepan dalam menjadikan Indonesia hebat.

Tak perlu ragu untuk menjadikan Indonesia hebat. Indonesia yang bermartabat. Indonesia yang kuat. Indonesia yang berdaulat. Seperti yang Soekarno ajarkan dalam konsep trisaktinya. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Jika ketiga ajaran Bung Karno tersebut bisa dilaksanakan. Maka, Indonesia hebat adalah keniscayaan. Kita masih rindu dan akan selalu merindukan Indonesia yang hebat.

Jika kita amati, salah satu partai yang menjadikan tagline utamanya Indonesia hebat adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mungkin PDIP ingin mengimplementasikan cita-cita Bung Karno dalam trisaktinya itu. Atau mungkin juga PDIP ingin meneruskan perjuangan Sang Proklamator tersebut dalam menjadikan Indonesia hebat di masa depan. Kita tunggu saja. Rakyat menunggu janji itu. Jangan hanya hebat di jargon. Namun juga harus hebat dalam pelaksanaan. Bukan hanya hebat ditagline. Tapi hebat juga dalam implementasi. Apakah Indonesia akan betul-betul hebat. Hanya waktu yang akan menjawab. Dan kita juga bisa bertanya kepada rumput yang bergoyang.

Untuk menjadi Indonesia hebat paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, membangun karakter bangsa. Institusi pendidikan harus didorong dan menjadi garda terdepan dalam menciptakan generasi bangsa yang berkarakter. Kedua, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Kreatifitas dan inovasi harus dikembangkan. Ketiga, menciptakan ekonomi yang berbasis pada keadilan dan kerakyatan.

Keempat, membangun TNI-Polri yang profesional. Kelima, membangun birokrasi yang melayani. Bukan ingin dilayani. Dan keenam, membangun persatuan dan kesatuan. Karena dengan bersatu kita bisa maju dan hebat.

Gagasan hanya tinggal gagasan. Ide hanya tinggal ide, jika tidak bisa diterapkan. Gagasan akan bergerak, bernyawa, dan memiliki ruh jika bisa dilaksanakan. Implementasi merupakan bentuk dari kehebatan gagasan dan ide.

Gagasan yang hebat adalah gagasan yang bisa diimplementasikan. Menjadikan gagasan Indonesia hebat bukan semata-mata tugas partai politik. Bukan hanya tugas capres, capwapres, dan para caleg. Tetapi kewajiban kita semua sebagai anak bangsa. Ya, kewajiban kita semua sebagai anak bangsa. Untuk menjadikan Indonesia benar-benar hebat. Semua bergantung pada kita. Indonesia membutuhkan pengorbanan dan perjuangan kita. Salam Indonesia Hebat!

■ Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta